

3 Juni 2005

No. : 1844/D/T/2005

Lamp. : 2 (dua) berkas

Hal. : Penerimaan CPNS Guru Kelas Sekolah Dasar tahun 2004

Kepada Yth.

1. Bupati Mamuju

2. Bupati Mamuju Utara

Sehubungan dengan surat Bupati Mamuju No. 800/236/BKD tanggal 23 Mei 2005 perihal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal berikut :

1. Lembaga pendidikan tinggi keguruan yang menyelenggarakan pendidikan guru Sekolah Dasar diatur oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0854/0/1989 tentang " Pengadaan dan Penyetaraan Guru Sekolah Dasar" khususnya Bab V pasal 5 (fotokopi terlampir).
2. Sesuai dengan surat Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam No. Dj.II/Dt.II.III/PP. 02.3/A2/1796/04 tanggal 8 Desember 2004 kepada Rektor UIN/IAIN, Ketua STAIN, Koordinator Kopertais dan Pimpinan PTAIS diseluruh Indonesia perihal program D-II PGSD/PGTKI (fotokopi terlampir), menyebutkan antara lain :
 - Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam tidak mengeluarkan ijin penyelenggaraan program D II PGSDI/PGTKI
 - Perguruan Tinggi Agama Islam yang merasa memenuhi syarat untuk menyelenggarakan program diploma PGSD (termasuk PGSDI) dan PGTK (termasuk PGTKI), diharapkan mengurus ijin penyelenggaraan program tersebut ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.

Atas dasar ketentuan dan informasi pada butir 1 dan 2 di atas, jelaslah bahwa lembaga pendidikan tinggi yang berhak menyelenggarakan program D-II PGSD adalah perguruan tinggi yang mendapatkan ijin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas (sampai tahun 2005 berjumlah 50 perguruan tinggi, daftar pada lampiran 1). Dengan demikian yang memenuhi kualifikasi untuk diangkat menjadi guru Sekolah Dasar (guru PNS maupun guru swasta) adalah lulusan program studi D-II PGSD dari perguruan tinggi yang mendapatkan ijin penyelenggaraan dari Ditjen Dikti Depdiknas. Lulusan program D-II PGSD dari lembaga yang tidak mendapatkan ijin dari Ditjen Dikti Depdiknas tidak memenuhi kualifikasi untuk diangkat sebagai guru Sekolah Dasar, karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Di samping hal tersebut di atas, seperti dikemukakan pada surat kami No. 3519/D/T/2004 tanggal 1 September 2004, lulusan program D-II PGSD dari penyelenggaraan kelas jauh juga tidak memenuhi kualifikasi guru kelas Sekolah Dasar.

Dengan demikian, persyaratan kualifikasi pendidikan guru kelas Sekolah Dasar untuk penerimaan CPNS guru kelas Sekolah Dasar tahun 2004 maupun tahun 2005, agar tetap memperhatikan surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 3519/D/T/2004 tanggal 1 September 2004. Jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan penerimaan guru CPNS, maka para Bupati (secara khusus Bupati Mamuju Utara) harus dapat membatalkan pengangkatan guru tersebut.

Dalam era otonomi daerah, para Bupati diharapkan berorientasi pada penegakan peraturan demi peningkatan mutu pendidikan dan tidak menerapkan kebijakan yang justru saling bertentangan dengan peraturan/hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Satryo Soemantri Brodjonegoro
NIP.130889802

Tembusan Yth. :

1. Mendiknas (sebagai laporan)
2. Menpan
3. Mendagri
4. Kepala BKN
5. Gubernur se-Indonesia
6. Bupati/Walikota se-Indonesia
7. Para eselon I di lingkungan Depdiknas
8. Rektor penyelenggara prodi D-II PGSD

Lampiran 1

**NAMA LEMBAGA PERGURUAN TINGGI (LPTK) PENYELENGGARA
PROGRAM STUDI D II PGSD**

NO.	NAMA PERGURUAN TINGGI	NOMOR DAN TANGGAL LEGALITAS	KETERANGAN
1	Universitas Negeri Medan	No. 400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl. 20 Agustus 1992	Pendidikan Prajabatan
2	Universitas Negeri Padang	No. 400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl. 20 Agustus 1992	Pendidikan Prajabatan
3	Universitas Negeri Jakarta	No. 400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl. 20 Agustus 1992	Pendidikan Prajabatan
4	Universitas Pendidikan Indonesia	No. 400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl. 20 Agustus 1992	Pendidikan Prajabatan
5	Universitas Negeri	No. 400.b/DIKTI/Kep/1992	Pendidikan Prajabatan

	Semarang	Tgl. 20 Agustus 1992	
6	Universitas Negeri Yogyakarta	No. 400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl. 20 Agustus 1992	Pendidikan Prajabatan
7	Universitas Negeri Surabaya	No. 400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl. 20 Agustus 1992	Pendidikan Prajabatan
8	Universitas Negeri Malang	No. 400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl. 20 Agustus 1992	Pendidikan Prajabatan
9	Universitas Negeri Makassar	No. 400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl. 20 Agustus 1992	Pendidikan Prajabatan
10	Universitas Negeri Manado	No. 400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl. 20 Agustus 1992	Pendidikan Prajabatan
11	Universitas Syahkuala	No. 400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl. 20 Agustus 1992	Pendidikan Prajabatan
12	Universitas Riau	No. 400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl. 20 Agustus 1992	Pendidikan Prajabatan
13	Universitas Jambi	No. 400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl. 20 Agustus 1992	Pendidikan Prajabatan
14	Universitas Sriwijaya	No. 400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl. 20 Agustus 1992	Pendidikan Prajabatan
15	Universitas Bengkulu	No. 400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl. 20 Agustus 1992	Pendidikan Prajabatan
16	Universitas Lampung	No. 400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl. 20 Agustus 1992	Pendidikan Prajabatan
17	Universitas Sebelas Maret	No. 400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl. 20 Agustus 1992	Pendidikan Prajabatan
18	Universitas Jember	No. 400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl. 20 Agustus 1992	Pendidikan Prajabatan
19	IKIP Singaraja	No. 400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl. 20 Agustus 1992	Pendidikan Prajabatan
20	Universitas Mataram	No. 400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl. 20 Agustus 1992	Pendidikan Prajabatan
21	Universitas Nusa Cendana	No. 400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl. 20 Agustus 1992	Pendidikan Prajabatan
22	Universitas Tanjung Pura	No. 400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl. 20 Agustus 1992	Pendidikan Prajabatan
23	Universitas Lambung Mangkurat	No. 400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl. 20 Agustus 1992	Pendidikan Prajabatan
24	Universitas Mulawarman	No. 400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl. 20 Agustus 1992	Pendidikan Prajabatan
25	Universitas Palangkaraya	No. 400.b/DIKTI/Kep/1992Tgl.	Pendidikan Prajabatan

		20 Agustus 1992	
26	Universitas Haluoleo	No. 400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl. 20 Agustus 1992	Pendidikan Prajabatan
27	Universitas Tadulako	No. 400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl. 20 Agustus 1992	Pendidikan Prajabatan
28	Univ. Negeri Gorontalo	No. 400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl. 20 Agustus 1992	Pendidikan Prajabatan
29	Universitas Pattimura	No. 400.b/DIKTI/Kep/1992Tgl. 20 Agustus 1992	Pendidikan Prajabatan
30	Universitas Cenderawasih	No. 400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl. 20 Agustus 1992	Pendidikan Prajabatan
31	Universitas Terbuka	No. 400.b/DIKTI/Kep/1992 Tgl. 20 Agustus 1992	Pendidikan penyetaraan
32	UNMUH Makassar	No. 2347/D/T/2001 Tgl. 6 Juli 2001	Pendidikan Prajabatan
33	Universitas Flores	No.: 2602/D/T/2001 Tgl. 6 Agustus 2001	Pendidikan Prajabatan
34	UNMUH Palangkaraya	No.: 1602/D/T/2002 Tgl. 2 Agustus 2002	Pendidikan Prajabatan
35	STKIP St. Paulus Ruteng NTT	No.: 1253/D/T/2003 Tgl. 20 Juni 2003	Pendidikan Prajabatan
36	ST. Filsafat Seminari Pineleng	No.: 3513/D/T/2001 Tgl. 14 Nopember 2001	Hanya untuk memenuhi kebutuhan yayasan sendiri, lulusannya tidak untuk diangkat menjadi PNS
37	UNMUH Buton	No.:81/D/O/2001 Tgl. 10 Juli 2001	Pendidikan Prajabatan
38	STKIP Bina Bangsa Getsempena	No. : 138/D/O/2003 Tgl. 5 September 2003	Pendidikan Prajabatan
39	STKIP Kie Raha	No.: 148/D/O/2003 Tgl. 5 September 2003	Pendidikan Prajabatan
40	UNMUH Prof. Dr. HAMKA Jakarta	No. 400c/DIKTI/Kep/1992 Tgl. 20 Agustus 1992	Pendidikan Prajabatan
41	Univ. Sanata Dharma Yohyakarta	No. 2614/D/T/2004 Tgl. 7 Juli 2004	Pendidikan Prajabatan
42	UKSW Salatiga	No. 400c/DIKTI/Kep/1992 Tgl. 20 Agustus 1992	Pendidikan Prajabatan
43	Univ. HKBP Nommensen Medan	No. 400c/DIKTI/Kep/1992 Tgl. 20 Agustus 1992	Tidak Operasional sejak beberapa tahun terakhir ini
44	Universitas Kanjuruhan	No. 400c/DIKTI/Kep/1992	Pendidikan Prajabatan

	Malang	Tgl. 20 Agustus 1992	
45	IKIP PGRI Semarang	No. 688/D/T/2004 Tgl. 18 Pebruari 2004	Hanya untuk 2 (dua) tahun penyelenggaraan/Pend. Prajabatan
46	Univ. Khairun Ternate	No. 211/DIKTI/Kep/2000 Tgl. 27 Juni 2000	Pendidikan Prajabatan
47	STKIP Gotong Royong Masohi	No. 2958/D/T/2003 Tgl. 10 Oktober 2003	Pendidikan Prajabatan
48	Univ. Serambi Mekkah	No. 3003/D/T/2003 Tgl. 17 Oktober 2003	Pendidikan Prajabatan
49	Akad. Keguruan "PARIS BARANTAI" Kota Baru - Kalsel	No. 95/D/O/2001 Tgl. 2 Agustus 2001	Pendidikan Prajabatan
50	Yayasan ST. Paulus Maumere (di bawah naungan Universitas Khatolik Widya Mandira Kupang)	No. 114/D/T/1995 Tgl. 18 Januari 1995	Hanya untuk memenuhi kebutuhan yayasan sendiri, lulusannya tidak untuk diangkat menjadi PNS

1 Juni 2005

Direktur Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan
dan Ketenagaan Perguruan Tinggi,

Sukamto
NIP. 130367414